

Gepenta Papua, Aprindo Papua dan Pemprov Papua Hadirkan Bazar Murah



Sumber: www.cenderawasihpos.jawapos.com

Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan untuk membeli sembako harga murah. Maka, DPP Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba Tawuran dan Anarkis (Gepenta) Provinsi Papua bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bazar murah dalam menyambut HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, yang berlangsung di Taman Imbi, Kota Jayapura, Sabtu (13/8) pekan kemarin.

Pembukaan bazar murah dibuka langsung Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Papua, Triwarno Purnomo, Ketua DPP Gepenta Papua Husni Difinubun, Ketua Aprindo Papua Tajudin Raubun dan perwakilan TNI, Polri, BNN Papua.

Triwarno mengatakan, Pemprov Papua mengapresiasi dan menyambut baik bazar murah sebagai bagian dari kepedulian Gepenta dan Aprindo kepada masyarakat di Papua terhadap kemampuan dan daya beli masyarakat, serta ini membantu dalam mengendalikan gejolak harga di pasar.

Kata Tri, pasar murah tersebut merupakan upaya yang dilaksanakan untuk melindungi dan menyelamatkan daya beli masyarakat, dengan menjaga ketersediaan bahan pangan sembako dan menjaga kestabilan harga.

Diakui, memang beberapa bulan lalu masyarakat mengeluh akibat harga sembako mengalami kenaikan harga yang tinggi, namun usaha pemerintah untuk tetap menjaga agar kenaikan harga tersebut agar tetap stabil atau terjangkau caranya dengan melakukan

bazar atau pasar murah dan melakukan pengecekan stok barang di distributor dan ke pasar.

“Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan menarik ini, inilah wujud perhatian kita kepada masyarakat,” jelasnya.

Ditempat sama, Ketua DPP Gepenta Provinsi Papua Husni Difinubun menambahkan, kegiatan ini adalah salah satu program kerja Gepenta Papua, yang mana Gepenta melihat saat ini harga sembako cukup mengalami kenaikan sehingga perlu adanya bazar murah untuk membantu masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya menggandeng Aprindo dan Pemprov Papua. Sekaligus ini sebagai upaya mensosialisasi organisasinya di Papua menjelang HUT Ke- 77 Kemerdekaan RI, memilih bazar murah sebagai salah satu kegiatan pendekatan di masyarakat.

“Pasar murah sebagai salah satu bentuk mensosialisasikan Gepenta kepada masyarakat dengan kepedulian bersosialisasi, bahwa kita hadir di sini untuk masyarakat umum, juga untuk mensosialisasikan anti narkoba, mencegah tindakan anarkis, dan tawuran,” pesannya.

Ketua DPD Aprindo Provinsi Papua Tajudin Raubun, mengakui, mengatakan bazar murah ini sering dilakukan dan sering bekerjasama dengan berbagai pihak salah satunya Disperindagkop Provinsi Papua dan Disperindagkop Kota Jayapura. Untuk mitra Aprindo Papua itu dengan Disperindagkop, Siber Pangan Polda Papua, dan UMKM yang ada di Kota Jayapura. Dalam bazar murah ini anggota dari Aprindo semua hadir kecuali retail SAGA.

“Kami berharap kehadiran Aprindo di Papua ikut memberikan kontribusi nyata dalam memberikan harga barang yang terjangkau, karena ini juga bagian dari CSR yang dilakukan ritel di Papua,” jelasnya.

Sumber berita:

1. *www.cenderawasihpos.jawapos.com*, Gepenta Papua, Aprindo Papua dan Pemprov Papua Hadirkan Bazar Murah, 15 Agustus 2022;
2. *www.reportasepapua.co.id*, Pemprov Papua Apresiasi Pasar Murah Semarak HUT ke-77 RI, Kolaborasi Gepenta dan Aprindo, 13 Agustus 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dana dekonsentrasi sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur meliputi:

- 1) pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
- 2) pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2021 terdapat rincian lokasi/kegiatan/output dekonsentrasi dan jumlah dana dekonsentrasi, dimana untuk Provinsi Papua dirincikan sebagai berikut:

33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	1,313,307,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	760,461,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	170,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	123,289,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	144,321,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	67,079,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	195,352,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	552,846,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBLIAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	137,673,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	175,134,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	120,678,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	119,361,000

Ketentuan lebih lanjut terkait kegiatan tersebut di atas diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022. Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah merupakan salah satu kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah.

Salah satu tugas dari Kementerian Perdagangan adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Pelaksanaan pasar murah merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan

barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan pasar murah ini juga diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien. Di samping itu, kegiatan pasar murah sebagai sarana untuk memperkenalkan produk UKM.

Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pasar murah meliputi pembiayaan untuk fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah berupa tenda, stand, beserta perlengkapannya seperti meja, kursi, tempat display dan/atau komponen lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan Pasar Murah.

Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) koordinasi dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan pasar murah;
- 2) menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah;
- 3) menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah yaitu berupa tenda, meja, kursi, tempat display barang atau stand, dan/atau fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah;
- 4) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi, termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginormasikan teknis pelaksanaannya;
- 5) pelaksanaan pasar murah minimal dilakukan sebanyak satu kali dalam tahun 2022;
- 6) barang-barang yang dijual pada pasar murah tersebut merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam, serta barang konsumsi lainnya dan produk-produk UKM, baik pangan maupun non pangan.